

Keterbukaan Menyeluruh terhadap Dunia Luar

2018-12-22 10:03:38

<http://indonesian.cri.cn/20181222/588a1c68-f7a9-1563-d5d9-994b29f16f19.html>

Rapat kerja ekonomi pemerintah pusat Tiongkok digelar di Beijing pada 19-21 Desember 2018. Presiden Xi Jinping dalam pidatonya menyimpulkan kinerja ekonomi sepanjang tahun 2018, menguraikan situasi ekonomi yang dihadapi Tiongkok saat ini, dan telah mengatur pekerjaan ekonomi tahun 2019.

Rapat kerja menekankan, tahun depan bertepatan HUT ke-70 Republik Rakyat Tiongkok, sekaligus satu tahun yang penting dalam pembangunan masyarakat sejahtera secara menyeluruh.

Rapat menunjukkan, tahun depan Tiongkok akan terus melaksanakan kebijakan fiskal yang proaktif dan kebijakan moneter yang stabil, melakukan pengurangan pajak dan iuran secara besar-besaran, menjaga pergerakan distribusi yang rasional dan kondusif, berusaha menyelesaikan masalah pendanaan bagi usaha swasta serta usaha mikro dan kecil.

Rapat menekankan perlunya melaksanakan keterbukaan menyeluruh pada tahun depan, agar keterbukaan dapat beralih dari keterbukaan komoditas menjadi keterbukaan peraturan. Untuk itu, Tiongkok akan memperlonggar akses pasar, secara menyeluruh melaksanakan daftar negatif investasi (DNI), melindungi hak dan kepentingan sah pengusaha asing, khususnya hak atas kekayaan intelektual, sementara itu, usaha modal murni asing juga akan diperizinkan.

Rapat menegaskan akan terus menyelenggarakan Forum Tingkat Tinggi Kerja Sama Internasional Satu Sabuk Satu Jalan, mendorong pembinaan komunitas senasib sepenanggungan umat manusia, dengan aktif berpartisipasi dalam reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan mendorong liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi. Rapat menyebut akan melaksanakan kesepakatan kedua kepala Tiongkok dan AS di Argentina dan mendorong perundingan perdagangan kedua negara.

Rapat berpendapat, pembangunan Tiongkok memiliki potensi yang sangat besar dan pertumbuhannya yang positif tidak akan berubah dalam jangka panjang. Rapat berharap pihak terkait berusaha menjaga ekonomi beroperasi di level yang rasional melalui pelaksanaan kebijakan makro yang kondusif.